

SOUND GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

Dadan Setia Nugraha

Universitas Pasundan Bandung Jawa Barat, Indonesia.

dadan.setianugraha@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Tata Kelola yang Baik dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Sumedang telah menetapkan diri sebagai kabupaten pariwisata dan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan, pengelolaan desa wisata masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal kebijakan, proses koordinasi, lembaga, maupun kinerja pengelola desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi literatur, observasi lapangan, dan diskusi kelompok terfokus. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pengujian validitas data dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang belum optimal akibat beberapa faktor: peraturan yang terlambat dan tidak sepenuhnya adaptif, menyebabkan penurunan jumlah desa wisata yang memenuhi syarat; koordinasi antara pemangku kepentingan yang belum terintegrasi; ketidakjelasan pembagian wewenang dalam pengelolaan desa wisata; kapasitas dan kinerja manajer yang rendah; serta keterlibatan aktor internasional yang minim dalam mendukung pengembangan desa wisata. Kondisi ini telah menyebabkan pengembangan desa wisata yang tidak konsisten dan tidak sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Governance, Sound Governance, Pariwisata, Desa Wisata

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze Sound Governance in the management of tourist villages in Sumedang Regency. The background of this study shows that although Sumedang Regency has established itself as a tourism regency and has experienced a significant increase in the number of tourist visits, the management of tourist villages still faces various obstacles, both in terms of policy, coordination processes, institutions, and the performance of tourist village managers. This study uses a qualitative method with a case study approach. This research method uses a case study method. Data collection techniques were carried out through interviews, literature studies, field observations and focus group discussion.. Then the data analysis techniques used are data validity testing techniques and data triangulation. The results of the study show that the management of tourism villages in Sumedang Regency is not yet optimal due to several factors: regulations that are late and not fully adaptive, resulting in a decline in the number of eligible tourism villages; coordination between stakeholders that is not yet integrated; ambiguity in the division of authority for tourism village management; low managerial capacity and performance of managers; and minimal involvement of international actors in supporting the development of tourism villages. These conditions have resulted in inconsistent tourism village development that is not in line with the overall increase in tourist visits.

Keywords: Governance, Sound Governance, Tourism, Tourist Villages.

RINGKESAN

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun neuleuman jeung nganalisis Tata Kelola Alus dina ngokolakeun désa-désa wisata di Kabupatén Sumedang. Kasang tukang ieu panalungtikan nunjukeun yen sanajan Kabupatén Sumedang geus ngadegkeun dirina minangka kacamatan pariwisata sarta ngalaman kanaékan anu signifikan dina jumlah kunjungan wisata, ngokolakeun désa wisata masih kénéh rupa-rupa halangan, boh dina hal kawijakan, prosés koordinasi, lembaga, jeung kinerja pangurus désa wisata. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode kualitatif kalayan pendekatan studi kasus. Métode panalungtikan ieu ngagunakeun métode studi kasus. Téhnik ngumpulkeun data dilaksanakeun ngaliwatan wawancara, studi sastra, observasi lapangan jeung diskusi kelompok fokus. Saterusna, téhnik analisis data anu digunakeun nya éta téhnik nguji validitas data jeung triangulasi data. Hasil panalungtikan némbongkeun yén ngokolakeun désa-désa wisata di Kabupatén Sumedang tacan optimal alatan sababaraha faktor: telat aturan jeung teu pinuh adaptif, ngabalukarkeun panurunan dina jumlah désa wisata anu layak; koordinasi antara pamangku kapentingan anu teu acan terpadu; teu jelas ngabagi wewenang dina ngokolakeun désa wisata; kapasitas manajer lemah sareng kinerja; kitu ogé involvement minimal aktor internasional dina ngarajong ngembangkeun désa wisata. Kaayaan ieu nyababkeun pangwangunan désa-désa wisata anu teu konsisten sareng henteu saluyu sareng paningkatan jumlah kunjungan wisata.

Kecap konci: Governance, Sound Governance, Pariwisata, Pariwisata Désa

PENDAHULUAN

Pariwisata semakin dipandang sebagai sektor strategis dalam pembangunan daerah karena kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat identitas sosial dan budaya lokal. Pascapandemi COVID-19, pembangunan pariwisata mengalami pergeseran paradigma dari pariwisata massal menuju pariwisata alternatif dan berkelanjutan yang menekankan keunikan lokal, pengalaman autentik, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi.

Dalam konteks tersebut, desa wisata berkembang sebagai salah satu model pembangunan pariwisata yang dinilai mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan kapasitas lokal, pelestarian budaya, dan pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, desa wisata menjadi salah satu program prioritas dalam kebijakan pembangunan pariwisata nasional.

Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang secara serius mengembangkan sektor pariwisata. Sejak mendeklarasikan diri sebagai kabupaten pariwisata pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadikan pariwisata sebagai program unggulan dalam perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten ini memiliki potensi pariwisata yang relatif lengkap, meliputi daya tarik alam, budaya, dan destinasi buatan, yang didukung oleh peningkatan aksesibilitas melalui keberadaan Tol Cisumdawu serta ketersediaan amenities dan kelembagaan pendukung pariwisata.

Upaya pengembangan pariwisata tersebut menunjukkan hasil yang signifikan secara kuantitatif. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumedang meningkat dari 248.080 kunjungan pada tahun 2020 menjadi 648.004 kunjungan pada tahun 2021. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan 1.285.543 kunjungan, meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 1.815.426 kunjungan, dan mencapai 1.824.704 kunjungan pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Sumedang tumbuh secara konsisten dalam periode pascapandemi.

Namun demikian, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak diikuti oleh perkembangan desa wisata secara proporsional. Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata, tercatat terdapat 26 desa wisata di Kabupaten Sumedang. Setelah peraturan daerah tersebut diimplementasikan, jumlah

desa wisata yang ditetapkan secara resmi menurun menjadi hanya 12 desa wisata. Penurunan ini menunjukkan adanya persoalan struktural dan kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata di tingkat daerah.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang tercermin dalam beberapa aspek utama, antara lain keterlambatan kebijakan daerah, lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal antar pemangku kepentingan, belum jelasnya pembagian peran dan kewenangan antar lembaga pengelola, serta rendahnya kapasitas manajerial dan kemandirian desa wisata. Akibatnya, pertumbuhan kunjungan wisatawan cenderung terkonsentrasi pada destinasi wisata yang dikelola oleh pihak swasta, sementara sebagian besar desa wisata mengalami stagnasi bahkan penurunan kunjungan.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai pengembangan desa wisata. Penelitian Rahmatillah, Insyah, Nurafifah, dan Hirsan (2019) menunjukkan bahwa permasalahan utama desa wisata terletak pada pelayanan sarana dan prasarana yang belum optimal serta pengemasan potensi desa yang belum mampu menjadi satu kesatuan paket wisata. Parasari dan Umilia (2019) menemukan bahwa rendahnya peran aktif pemerintah desa dalam memotivasi dan membina masyarakat menjadi kendala utama partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Sementara itu, Darmayanti, Oka, dan Sukita (2020) menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia lokal, khususnya dalam penguasaan bahasa asing dan pemahaman potensi pariwisata secara komprehensif, menjadi faktor penghambat pengembangan desa wisata.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengidentifikasi berbagai kendala pengembangan desa wisata, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek sektoral dan teknis. Kajian yang menganalisis desa wisata dalam kerangka tata kelola yang komprehensif mencakup dimensi kebijakan, proses, organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, serta pengaruh lingkungan eksternal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang menggunakan pendekatan *sound governance*, guna memberikan kontribusi teoretis bagi studi tata kelola pariwisata serta rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan desa wisata sebagai pilar pembangunan pariwisata daerah yang berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kelembagaan, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Creswell (2013: 155) menjelaskan bahwa studi kasus kelembagaan adalah identifikasi kasus tertentu yang akan dideskripsikan dan dianalisis. Kasus yang dimaksud dapat diartikan sebagai entitas konkret, seperti individu, kelompok kecil, organisasi, atau kemitraan, proses pengambilan Keputusan, atau peristiwa. Studi kasus kelembagaan mempelajari kasus-kasus kehidupan nyata saat ini yang sedang berlangsung sehingga mereka dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan tidak terseret oleh waktu.

Pendekatan kualitatif dijelaskan oleh Sugiyono (2020: 42) merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Langkah penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive sampling*. Sugiyono (2020: 54) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Artinya yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah mereka-mereka yang ada hubungannya dengan penegelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang. Informan penelitian tersebut dipilih berdasarkan asumsi bahwa mereka akan memberikan informasi yang akurat tentang *sound*

governance dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang. Berikut ini peneliti sajikan daftar informan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Sumber Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPPEDA Kabupaten Sumedang	1
2	Kepala Bidang Pariwisata DISPARBUDPORA Kabupaten Sumedang	1
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Sumedang	1
4	Kepala Desa	1
5	Ketua Pokdarwis Kabupaten Sumedang	1
6	Asosiasi Wisata Sumedang	1
JUMLAH		6

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Selanjutnya Teknik analisis data dilakukan dengan cara data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Adapun pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui credibility, transferability, dependence, dan certainty.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Proses

Dimensi proses dalam sound governance menekankan kualitas hubungan dan interaksi antarpemangku kepentingan yang mencakup pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan aktor eksternal. Berbeda dengan pendekatan good governance yang menilai partisipasi melalui indikator administratif, sound governance lebih menekankan substansi relasi, dinamika interaksi, serta sejauh mana proses tersebut menghasilkan pengambilan keputusan bersama yang bermakna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang masih didominasi pola hierarkis, di mana keputusan strategis banyak ditentukan oleh pemerintah desa, khususnya Kepala Desa. Namun demikian, mulai muncul praktik konsultatif dan pelibatan masyarakat melalui forum informal dan kegiatan musyawarah. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran awal menuju pola shared decision-making, meskipun belum terlembagakan secara sistematis.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Wulandari (2022) yang menyatakan bahwa model pengambilan keputusan partisipatif merupakan fondasi penting dalam tata kelola kolaboratif karena mampu memperkuat legitimasi kebijakan dan rasa memiliki masyarakat. Selanjutnya, Hidayat (2023) menegaskan bahwa transformasi menuju pengambilan keputusan bersama menuntut perubahan budaya organisasi, transparansi informasi, serta mekanisme musyawarah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dimensi Struktur

Dimensi struktur berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur peran, kewenangan, serta relasi antar lembaga dalam sistem tata kelola. Struktur mencakup lembaga, regulasi, prosedur, mekanisme pengambilan keputusan, dan otoritas yang menjadi pedoman jalannya proses pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kelembagaan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang masih relatif sederhana. Ukuran organisasi kecil, kompleksitas rendah, tingkat formalisasi terbatas, dan sentralisasi kewenangan masih tinggi pada pemerintah desa. Struktur yang belum matang ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara BUMDes dan Pokdarwis serta lemahnya mekanisme pengawasan dan koordinasi.

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Rasyid (2020) yang menjelaskan bahwa desentralisasi sering kali tidak disertai pembagian kewenangan yang jelas di tingkat pelaksana, sehingga praktik tata kelola tetap bersifat hierarkis. Pandangan ini diperkuat oleh Wicaksono (2021) yang menegaskan bahwa kejelasan pembagian tugas dan batas kewenangan antar lembaga merupakan elemen fundamental dalam menciptakan tata kelola kolaboratif yang akuntabel.

Dimensi Kognisi dan Nilai

Dimensi kognisi dan nilai mencerminkan sistem nilai normatif yang menjiwai perilaku aktor, cara kerja organisasi, serta arah kebijakan publik. Nilai-nilai seperti keadilan, integritas, toleransi, partisipasi, dan adaptabilitas menjadi fondasi etis dalam penerapan sound governance.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah masih menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang. Masyarakat menunjukkan partisipasi sosial yang tinggi dalam kegiatan wisata. Namun, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem pengambilan keputusan dan pengelolaan kelembagaan.

Temuan ini sejalan dengan Puspitasari (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam desa wisata sering kali tinggi pada aspek sosial, tetapi belum terintegrasi dalam sistem kelembagaan formal. Selain itu, Setiawan (2020) menegaskan bahwa nilai gotong royong berperan penting dalam menjaga keberlanjutan wisata berbasis komunitas, namun tetap memerlukan pelembagaan agar tidak bergantung pada figur kepemimpinan tertentu.

Dimensi Konstitusi

Dimensi konstitusi dalam sound governance berkaitan dengan landasan hukum, jaminan hak dan kewajiban, pembagian kewenangan, serta mekanisme perubahan dalam tata kelola. Kerangka konstitusional berfungsi menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang telah memiliki dasar hukum pengelolaan desa wisata melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 dan peraturan turunannya. Namun, implementasi regulasi tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang jelas di tingkat desa, khususnya terkait pembagian kewenangan dan jaminan hak pelaku wisata.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Sulastri (2022) yang menegaskan bahwa distribusi kekuasaan yang proporsional antara pemerintah desa, lembaga lokal, dan masyarakat merupakan kunci tata kelola yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, Firmansyah (2022) menyatakan bahwa penerapan sound governance menuntut keseimbangan antara pendekatan sosial berbasis nilai dan sistem sanksi yang tegas agar tata kelola tetap harmonis sekaligus akuntabel.

Dimensi Organisasi dan Institusi

Dalam perspektif sound governance, organisasi dan institusi berperan sebagai instrumen yang menjembatani nilai-nilai normatif dengan praktik implementatif pemerintahan. Kualitas tata kelola sangat ditentukan oleh kesesuaian organisasi dengan tujuan dan konteks sosial yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pengelola desa wisata di Kabupaten Sumedang masih didominasi oleh organisasi berbasis komunitas dengan kapasitas institusional yang terbatas. Struktur organisasi sederhana, pembagian kerja belum proporsional, dan profesionalitas kelembagaan masih rendah.

Temuan ini sejalan dengan Kusuma (2020) yang menyatakan bahwa formalisasi kelembagaan merupakan proses penting dalam penguatan tata kelola publik. Selain itu, Pradana (2022) menegaskan bahwa rendahnya tingkat formalisasi organisasi berdampak pada lemahnya mekanisme akuntabilitas dan pengawasan internal.

Dimensi Manajemen dan Kinerja

Dimensi manajemen dan kinerja menilai kemampuan organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program secara berorientasi hasil dan keberlanjutan. Dalam sound governance, kinerja tidak hanya diukur dari output, tetapi juga dari outcome dan dampak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar desa wisata di Kabupaten Sumedang masih lemah dalam perencanaan jangka panjang, pengelolaan keuangan, dan evaluasi kinerja. Banyak desa wisata masih bergantung pada anggaran pemerintah desa dan belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Santoso (2020) yang menyatakan bahwa ketergantungan tinggi terhadap anggaran pemerintah mencerminkan lemahnya manajemen kinerja organisasi lokal. Selain itu, Wulandari (2022) menegaskan bahwa evaluasi berbasis outcome merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas tata kelola desa wisata.

Dimensi Kebijakan

Dimensi kebijakan mencakup proses ideasi, formulasi, legitimasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam sound governance, kebijakan harus bersifat integratif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desa wisata di Kabupaten Sumedang relatif terlambat dan bersifat selektif. Penerapan kebijakan yang ketat justru menyebabkan penurunan jumlah desa wisata yang ditetapkan secara resmi, tanpa diimbangi dengan strategi penguatan kapasitas desa.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Pratama (2023) yang menegaskan bahwa kebijakan pariwisata berbasis komunitas memerlukan forum multipihak agar proses perumusan dan implementasi kebijakan tidak bersifat sektoral dan parsial.

Dimensi Sektor

Sound governance menempatkan integrasi lintas sektor sebagai prasyarat utama keberhasilan tata kelola publik, terutama pada isu multidimensional seperti pariwisata desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang masih dipandang sebagai urusan sektor pariwisata semata. Keterlibatan sektor lain seperti pertanian, infrastruktur, UMKM, dan lingkungan hidup masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistemik.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Sutrisno (2022) yang menyatakan bahwa forum koordinasi lintas sektor merupakan instrumen strategis untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan efisiensi implementasi program pembangunan daerah.

Dimensi Kekuatan Internasional (Globalisasi)

Dalam kerangka sound governance, aktor internasional dipandang sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi tata kelola lokal melalui jejaring, investasi, dan pertukaran pengetahuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktor internasional dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas dan belum menyentuh desa wisata secara langsung. Potensi kerja sama internasional belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan kapasitas dan promosi global.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Pramudita (2023) yang menegaskan bahwa daya saing pariwisata lokal hanya dapat tumbuh apabila inovasi kelembagaan dan digitalisasi promosi dijalankan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh aktor desa.

Dimensi Etika, Akuntabilitas, dan Transparansi

Dimensi etika, akuntabilitas, dan transparansi merupakan fondasi normatif sound governance yang menjamin integritas, legitimasi, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik etika dan transparansi dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang masih bersifat informal dan sangat bergantung pada figur pemimpin desa. Mekanisme pelaporan dan pengawasan belum sepenuhnya dilembagakan secara sistematis.

Kondisi ini sejalan dengan Hidayat (2023) yang menegaskan bahwa transparansi informasi dan mekanisme pengawasan partisipatif merupakan kunci keberlanjutan tata kelola desa wisata. Selain itu, Wulandari (2022) menekankan bahwa akuntabilitas yang tidak dilembagakan berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan keberlanjutan tata kelola.

SIMPULAN

Pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan adanya pergeseran awal menuju penerapan prinsip sound governance, terutama pada dimensi proses, kognisi dan nilai, serta etika partisipatif yang berakar kuat pada budaya lokal. Nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan masih menjadi fondasi sosial utama dalam pengelolaan desa wisata. Namun demikian, praktik tata kelola yang berlangsung masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terlembagakan, sehingga keberlanjutan pengelolaan desa wisata masih sangat bergantung pada figur kepemimpinan dan dinamika lokal.

Dari sisi struktur, konstitusi, serta organisasi dan institusi, penelitian ini menemukan bahwa kerangka regulasi dan kelembagaan desa wisata di Kabupaten Sumedang telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme operasional yang jelas dan konsisten. Pembagian kewenangan yang belum proporsional, tingkat formalisasi yang rendah, serta kapasitas kelembagaan yang terbatas menyebabkan praktik tata kelola cenderung hierarkis dan kurang adaptif. Kondisi ini menghambat terwujudnya kolaborasi yang setara antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat sebagai aktor utama desa wisata.

Pada dimensi manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, serta kekuatan internasional, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pariwisata daerah belum diikuti oleh penguatan desa wisata secara seimbang. Pengelolaan desa wisata masih bergantung pada dukungan anggaran pemerintah desa, belum terintegrasi lintas sektor, serta minim keterlibatan aktor eksternal dan internasional. Akibatnya, desa wisata belum berkembang sebagai ekosistem pembangunan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang besar.

Sound governance dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sumedang perlu diarahkan pada penguatan institusionalisasi tata kelola melalui integrasi nilai, struktur, kebijakan, dan aktor lintas sektor secara simultan. Penguatan regulasi operasional, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, pelebagaan partisipasi masyarakat, serta pengembangan jejaring lintas sektor dan internasional menjadi kunci utama untuk mewujudkan pengelolaan desa wisata yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sound governance tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga model praktis dalam mendorong desa wisata sebagai pilar pembangunan pariwisata daerah di Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. (2019). *Collaborative Governance dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park Di Kabupaten Tabalong*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmayanti, P. W., Oka, I. M. D. and Sukita, I. W. (2020). Pengembangan Desa Wisata Kaba-Kaba Dalam Perspektif Masyarakat Lokal. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 11(1), 15-23. doi: 10.22334/jihm.v11i1.173.
- Dewi. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog Dan Pertunjukan Reyog Di Kabupaten Ponorogo)*. Universitas Sebelas Maret.
- Domai, T. (2011). *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Firmansyah, R. (2022). *Keseimbangan Nilai Sosial dan Penegakan Aturan dalam Mewujudkan Sound Governance di Pemerintahan Desa*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 85–98. Bandung: Universitas Pajaradjaran.
- Haris, S. (2019). Governance: Perubahan Paradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal SOSFILKOM (Sosial, Filsafat, dan Komunikasi)*, 33-47.
- Hidayat, A. (2023). *Transformasi Pola Pengambilan Keputusan di Tingkat Pemerintahan Desa: Dari Sentralistik ke Partisipatif*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 155–168. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Hoessein, B. (2001). Transparansi Pemerintahan Lokal yang Baik. *Jurnal Forum Inovasi*, 15-35.
- Kusuma, D. (2020). *Tingkat Formalisasi dan Efektivitas Tata Kelola Organisasi Publik di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Publik*, 7(2), 112–124. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nurcholis, H. (2019). *Konsep Dasar Local Government*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Parasari, M. K., & Umilia, E. (2018). Penentuan Tipologi Desa Wisata Berdasarkan Kesamaan Karakteristik Komponen Pembentukan Desa Wisata di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal TEKNIK ITS*, 210-215.
- Pradana, A. (2022). *Hubungan antara Formalisasi Organisasi dan Akuntabilitas Kelembagaan di Tingkat Desa*. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 5(3), 98–109. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Pratama, R. (2023). *Forum Multi-Stakeholder sebagai Mekanisme Sound Governance di Sektor Pariwisata Lokal*. *Jurnal Pembangunan dan Tata Kelola*, 5(2), 88–101.
- Puspitasari, R. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata di Indonesia: Antara Antusiasme Sosial dan Kelembagaan Formal*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Publik*, 7(2), 133–146. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rahmatillah, T. P., Insyah, O., Nurafifah, & Hirsan, F. P. (2019). Strategi Pengelolaan Desa Wisata

- Berbasis Wisata Alam dan Budaya Sebagai Media Promosi Desa Sangiang . *Jurnal Planoearth*, 111-116.
- Rasyid, H. (2020). *Desentralisasi dan Tantangan Pembagian Kewenangan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Daerah*, 6(2), 112–124. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, E. (2020). *Sentralisasi dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Pemerintahan Desa*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 87–99. Malang: Universitas Brawijaya.
- Setiawan, D. (2020). *Efektivitas Program dan Evaluasi Kinerja dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(3), 98–112.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, E. (2022). *Distribusi Kekuasaan dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 8(1), 95–108.
- Sutrisno, E. (2022). *Forum Koordinasi Lintas Sektor dalam Penerapan Prinsip Good Governance di Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(3), 150–163.
- Tahir, A. (2020). *Administrasi Public (Good Governance Menuju Sound Government)*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, B. (2021). *Pembagian Tugas dan Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik di Daerah*. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(3), 134–147.
- Wulandari, D. (2022). *Pelebagaan Partisipasi dalam Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Komunitas*. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Masyarakat*, 8(3), 101–115. Malang: Universitas Brawijaya.